II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu proses, cara atau perbuatan menegakkan sesuatu. Sedangkan, hukum :

1. Peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak, misalnya yang disebut negara hukum ialah negara yang dalam segala hal berdasarkan pada hukum.
2. Segala undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat.
3. Ketentuan (kaidah, patokan) mengenai sesuatu peristiwa atau kejadian alam, dan sebagainya; misalnya sesuai dengan hukum bahasa Indonesia.
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim (dalam pengadilan); misalnya memutuskan hukum, menjatuhkan keputusan' kena hukum, dijatuhi hukuman yang diputuskan oleh hakim.¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

¹ Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet VII, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 1031.

bernegara. Ditinjau dari sudutnya penegakkan hukum dibagi menjadi dua yaitu dari sudut subyektif dan sudut obyektif.

Dari sudut subyeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Ditinjau dari sudut obyektifnya, yaitu dari segi hukumnya. Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum material mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya terdapat aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja, karena itu penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum'

dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.²

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.³

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan-pelaksanaan putusan hakim. Perlu diingat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan

² <http://viarviorviera.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum-di-indonesia.html>(di akses pada : 3/1/2013)

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁵

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu untuk bekerja mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.⁶

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Kedalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *notabene* adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁷

Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan diperoleh gambaran stereotips yang kosong. Membahas penegakan

⁵ *Ibid.*, hlm. 7-8

⁶ Satjipto Rahardjo, *loc. cit.*, hlm. viii

⁷ *Ibid.*, hlm. 12

hukum menjadi berisi apabila dikaitkan dengan pelaksanaannya yang kongkret oleh manusia.⁸ Penegakan hukum memang dilakukan oleh orang-orang, tetapi perlu ditambahkan bahwa penegakan hukum adalah juga kegiatan suatu organisasi. Maka tindakan orang-orang tersebut tidak dapat dilepaskan dari tempat mereka menjadi anggotanya.

Penegakan hukum merupakan penjabaran ide dan cerita hukum ke dalam bentuk-bentuk konkrit. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide kedalam bentuk konkrit membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi-organisasi tersebut, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara. Walaupun pada hakekatnya organisasi tersebut bertugas untuk mengantarkan kepada tujuan-tujuan hukum, namun masing-masing badan berdiri sendiri dan bersifat otonom.

Penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah maupun struktur sosial masyarakatnya. Hukum dan masyarakat sangat terkait erat dan saling mempengaruhi. Dilihat dari segi penegakan hukum, maka ini berarti, hukum juga akan tertarik kedalam medan pengaruh dari konfigurasi kekuasaan dalam masyarakat. Akhirnya, apabila hukum dituntut untuk memperlakukan setiap anggota masyarakat secara sama, pada saat yang sama hukum justru dihadapkan pada keadaan yang tidak sama.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang

⁸ *Ibid.*, hlm.26

bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

B. Alat-Alat Bukti Dalam KUHP

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dan di dalam Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau biasanya di sebutkan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara.⁹

Kekuatan alat bukti atau juga disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat tergantung dari beberapa faktor. Sebut saja faktor itu adalah psiko-sosial (kode etika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat) dan partisipasi masyarakat. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing

⁹ Martiman Prodjohamidjo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 19

perilaku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.

Diformulasikan oleh Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya 5 (lima) alat bukti yang sah. Dibandingkan dengan hukum acara pidana terdahulu yaitu HIR (Stb. 1941 Nomor 44), ketentuan mengenai alat-alat bukti yang diatur oleh KUHAP ini mempunyai perbedaan yang prinsip dengan HIR.¹⁰

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan di dasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yaitu: “Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”.

Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang sah dalam persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat-surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

¹⁰ <http://minsatu.blogspot.com/2011/02/pembuktian-dalam-hukum-pidana.html>(di akses pada : 5/10/2012)

1. Keterangan Saksi

Saksi menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.¹¹

Memahami saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.¹² Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, Pasal 1 butir 26 KUHAP, ditentukan :“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Pasal 1 butir 26 tersebut diatas hanya menyebutkan tentang orang yang dapat memberikan keterangan. Menyimak klausula ini, tentu ditafsirkan ada orang-orang tertentu yang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi. Memang dalam KUHAP sendiri telah ditentukan mengenai pengecualian-pengecualian

¹¹ Andi Hamzah, 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm. 162

¹² Sabto Budoyo, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang. 2008. Hlm. 12

untuk menjadi saksi. Pengecualian-pengecualian yang dimaksud antara lain diatur dalam Pasal 168, 170 dan 171 KUHAP.

Pengecualian menjadi saksi termasuk dalam Pasal 168 KUHAP, ditentukan :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga karena yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

2. Keterangan ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP, ditentukan :

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro ditentukan : “Keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu”.Selanjutnya Pasal 186 KUHAP, ditentukan:“keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan”.

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim. Ketentuan pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan bahwa ada dua kelompok ahli yaitu, ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli-ahli lainnya.

3. Alat Bukti Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Surat merupakan alat bukti yang menduduki urutan ketiga dari alat-alat bukti lain sebagaimana tersebut kedalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

4. Alat Bukti Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain. Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP, menyatakan dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Oleh karena itu petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal

188 ayat (2) hanya dapat diperoleh dari Keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Pada ketentuan Pasal diatas, pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau diberikan terdakwa di sidang Pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu tidak mutlak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan Pengadilan. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab.

Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, adalah bahwa keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai alat-alat bukti lainnya dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini mengingat terdakwa dalam memberikan keterangan tidak atau tanpa mengucapkan sumpah atau janji.

Menurut Pasal 185 Ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Menurut ayat (3) ketentuan tersebut tidak berlaku

apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat dua alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka hal itu cukup untuk menuntut si pelaku. Kecukupan bukti permulaan (minimal dua alat bukti terpenuhi), cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dimaksud.

C. Pembuktian Pidana

Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Pembuktian juga ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Secara konkret, Adami Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta
2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum

Menurut Leden Marpaung,¹³ salah satu asas umum peradilan adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption innoence*) yang dirumuskan pada butir c Penjelasan Umum KUHAP bahwa setiap orang yang disangka atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah “sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Kesalahan tersangka/terdakwa berdasarkan pendapat pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut pendapat

¹³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta. Sinar Grafika, 2009, Hlm. 23

Penuntut Umum memenuhi syarat. Hal ini berarti bahwa menurut pendapat Penuntut Umum, perbuatan/delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup.

Secara logika, karena Penuntut Umum yang mendakwakan maka Penuntut Umum harus dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang didakwakannya, tetapi secara kenyataan karena alat bukti sah yang tercantum pada berkas perkara bukan ia yang mempersiapkan (dipersiapkan penyidik) maka jika pada pemeriksaan di persidangan ada perubahan tentang nilai pembuktian adalah hal yang tidak wajar jika dipertanggung jawabkan kepadanya.

Pasal 66 KUHAP menyatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Demikian juga dengan Penuntut Umum, menurut Pasal 129 KUHAP, setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Pasal 183 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapinya dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Di dalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan

berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP).

Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutannya (*requisitoir*). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*peledoi*), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (*vonis*) yang dibuatnya.

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan kedua rumusan Pasal 139 dan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP maka dapat diketahui bahwa beban pembuktian pada hakikatnya dilaksanakan oleh penyidik yang berusaha maksimal mengumpulkan alat bukti sah yang selanjutnya diteliti oleh Penuntut Umum yang akan menentukan kelanjutan proses perkara tersebut apakah ditutup demi kepentingan hukum atau dilimpahkan ke Pengadilan Negeri atau dilakukan sendiri pada pemeriksaan tambahan.

Ruang Lingkup Pembuktian :

1. Sistem pembuktian
2. Jenis alat bukti
3. Cara menggunakan dan nilai

4. Kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti

Secara Teoritis terdapat empat teori mengenai sistem pembuktian yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*)

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah.

2. Sistem pembuktian menurut *keyakinan* hakim melulu (*conviction intime*)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem "*Conviction Intime*", kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat pada suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim dapat terasa nuansa subjektifnya.

3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*)

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Berdasarkan beberapa sistem di atas, di dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Di dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewujs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap.

Hal ini, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan minimal ada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Pasal 184 ayat (1) KUHAP memperinci alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan *standard Beyond a reasonable doubt* (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan) dan pemidanaan yang dijatukan dapat dianggap sewenang-wenang.

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam hal pembuktian ini keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, dimana korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

D. Tindak Pidana Kesaksian Palsu dan Sanksi Pidana

1. Pengertian Kesaksian Palsu

Kesaksian atau keterangan palsu di pengadilan, saksi diduga telah menyampaikan keterangan secara tidak pantas, tidak sewajarnya dan, atau tidak masuk akal sehat, yang dapat dikategorikan sebagai kesaksian palsu. Hampir seluruh pertanyaan majelis hakim, jaksa maupun pengacara dan, atau terdakwa yang ditujukan kepada saksi dijawab dengan serba "tidak." Yakni, "tidak tahu", "tidak ingat alias lupa", "tidak ada", "tidak kenal", "tidak pernah", "tidak mengerti", "tidak menerima uang" dan berbagai kata "tidak" lainnya.

Saksi dan kesaksian, dalam hukum pidana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (Bahasa Belanda) dan dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang, Hukum Acara Pidana dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan pidana ini (materi dan acara) merupakan hukum positif di Indonesia, atau hukum/ketentuan yang berlaku saat ini.

Mengenai kesaksian, oleh KUHP diatur pada Pasal 242 Buku Kedua tentang Kejahatan Bab IX berjudul, Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu. Pasal 242 ayat (1) menyatakan, Barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan UU menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk, dihukum penjara selama-lamanya tujuh

tahun. Pada ayat (2) disebutkan, "Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau si tersangka, tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Sedangkan pada ayat (3) ditambahkan, "Yang disamakan dengan sumpah, yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut UU umum, menjadi ganti sumpah".

Agar seorang saksi yang memberikan keterangan palsu dapat dihukum, unsur yang harus dipenuhi adalah, keterangan itu harus di atas sumpah. Keterangan itu diwajibkan menurut UU atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, dan keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuannya diketahui oleh pemberi keterangan.

2. Sumpah Palsu (*Meineed*)

Sumpah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya, kemudian perkataannya itu di kaitkan dengan pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu, untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar. Sedangkan palsu, yaitu ucapan atau keterangan seorang saksi ahli di bawah sumpah yang diikrarkan di persidangan yang memuat keterangan tidak benar.

Sumpah Palsu atau Keterangan Palsu adalah suatu keterangan yang diberikan sehubungan dengan sumpah. Keterangan itu terdiri tidak hanya atas keterangan-keterangan kesaksian dalam perkara pidana, tetapi semua pemberitahuan-pemberitahuan dalam kata-kata tentang perbuatan-perbuatan dan peristiwa-

peristiwa. Keterangan itu harus diberikan diatas sumpah, pengambilan sumpah mana dilakukan sebelum keterangan itu diberikan untuk menegaskannya.

Antara sumpah atau janji dan pelanggaran terdapat jangka waktu, pelanggaran terjadi setelah pemberian keterangan palsu. Selanjutnya keterangan itu harus palsu, tidak benar atau bertentangan dengan nilai kebenaran. Keterangan itu sudah bersifat palsu, apabila keterangan itu memuat kekurangan dalam kebenaran.

Kekurangan dalam kebenaran dapat bersifat positif atau negatif. Bersifat positif apabila keterangan yang diberikan itu bertentangan dengan kebenaran atau tidak benar, sedangkan bersifat negatif, apabila kebenaran atas sesuatu hal disembunyikan.

Keterangan palsu bahwa keterangannya harus bohong atau tidak benar. Untuk sumpah palsu cukup bahwa sebagian dari keterangannya tidak benar, jadi tidak perlu semua ketrangannya itu bohong. Menurut Simons-Pompe, apabila dengan memberitahukan sesuatu, maka hal yang lebih dulu telah diberitahukan menjadi tidak benar, hal ini merupakan sumpah palsu. Dengan adanya unsur kesengajaan dalam hal ini berarti bahwa si pemberi keterangan harus tahu bahwa keterangannya tidak benar.

3. Keterangan Di Bawah Sumpah

Keterangan di bawah sumpah dapat diberikan secara lisan atau dengan tulisan, sendiri atau oleh wakilnya. Keterangan dengan lisan ini berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, yaitu

memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam pengadilan.

Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Keterangan dengan tulisan berarti bahwa seseorang menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana. Sedangkan keterangan di bawah sumpah diberikan oleh seorang wakil, maka wakil itu harus diberi kuasa khusus, artinya dalam surat kuasa harus disebutkan dengan jelas isi keterangan yang akan diucapkan oleh wakil itu.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi.

Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dan hal ini sudah panjang lebar diuraikan dalam ruang lingkup pemeriksaan saksi. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan: "wajib mengucapkan" sumpah atau janji.

2. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing
3. Lafal sumpah atau janji

Berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Pada prinsipnya sumpah atau janji wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.

Sumpah atau janji pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi memberi keterangan, tetapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan “sesudah” saksi memberi keterangan.

Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterangkan, yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sandera, penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang.

Penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161 KUHAP). Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti, tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

4. Sumpah Diperintahkan Oleh Undang-Undang

Sumpah yang diperintahkan oleh undang-undang adalah dalam hal seorang diperiksa di muka pengadilan sebagai saksi, maka saksi tersebut sebelum memberikan keterangan harus diambil sumpah akan memberikan keterangan yang

benar. Penyumpahan ini adalah syarat untuk dapat mempergunakan keterangan saksi itu sebagai alat bukti.

Sumpah yang oleh undang-undang ditentukan ada akibat hukum dari pengambilan sumpah itu adalah dalam hal seorang penggugat atau tergugat dalam perkara perdata di muka pengadilan diminta lawannya akan diambil sumpah untuk menguatkan keterangannya. Sumpah ini tidak diperintahkan oleh undang-undang, artinya yang diminta diambil sumpah dapat menolak pengambilan sumpah itu, tetapi apabila ia mau dan terjadi pengambilan sumpah, maka akibat hukum yang oleh undang-undang dilekatkan pada pengambilan sumpah itu adalah bahwa pihak yang diambil sumpah itu akan menang perkaranya. Jadi, seseorang yang memberikan keterangan bohong dibawah sumpah dapat dihukum atau dipidana.

5. Delik Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu

Semula Bab IX Buku II KUHP tentang sumpah Palsu dan keterangan palsu terdiri atas dua pasal saja, yaitu Pasal 242 dan 243. Akan tetapi Pasal 243 sudah dihapus dengan Sbd. 1931 No. 240, maka tersisa satu pasal, yaitu Pasal 242.¹⁴

Keterangan saksi atau ahli yang merupakan salah satu alat bukti, sangat penting karena dapat menyebabkan seorang terdakwa diputus bebas walaupun dia bersalah dan sebaliknya dapat dijatuhi pidana walaupun sesungguhnya dia tidak bersalah. Oleh karena itu, diancam dengan pidana seseorang saksi atau ahli yang bersumpah palsu. Bahkan salah satu the ten commandment (sepuluh perintah Tuhan melalui Musa), yaitu “jangan engkau bersumpah palsu”.¹⁵

¹⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Jakarta. Universitas Trisakti. 2011. Hlm. 389.

¹⁵ Andi Hamzah, *Ibid*. Hlm. 389-390

Ketentuan undang-undang yang mengancam dengan pidana terhadap orang yang memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu atau yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu di bawah sumpah di depan persidangan itu adalah Pasal 242 KUHP adapun perumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Jika keterangan palsu diatas sumpah, diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan, yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- 4) Pidana pencabutan hak tersebut pasal 35 (tentang pencabutan hak) nomor 1-4 dapat dijatuhkan.

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) ayat (1) :

1. Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum keterangan demikian,
2. Sengaja
3. Memberi keterangan-keterangan palsu di atas sumpah,

4. Baik dengan lisan maupun tulisan, secara pribadi maupun kuasanya yang khusus ditunjuk itu.

Ada bagian inti delik “sengaja” sehingga saksi yang memberi keterangan tidak benar, karena lupa atau salah lihat, salah dengar atau yang dialami salah tangkap, tidak masuk dalam rumusan delik ini.

Hoge Raad memutuskan bahwa kesengajaan ditujukan pada keterangan palsu itu. Artinya, pembuat sadar, bahwa keterangannya itu bertentangan dengan kebenaran, dan hal itu harus dibuktikan (HR 27 Juni 1932, NJ. 1932, p. 1633). Keterangan palsu itu harus bertentangan dengan kebenaran (HR 1 Desember 1964, Nj. 1965, 178). Pasal 242 KUHP ini ada padanannya Ned. WvS., yaitu Artikel 207. Dengan ancaman pidana penjara ayat (1) lebih ringan, yaitu enam tahun atau denda kategori IV.

Akan tetapi ancaman pidana pada ayat (2) yang merupakan keadaan yang memperberat pidana yang tersebut pada ayat (1) artinya bagian inti delik sama dengan tersebut pada ayat (1) ditambah : “keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka,” ancaman pidana penjara dalam KUHP sama dengan ancaman pidana dalam Ned. WvS, yaitu sembilan tahun.

Namun ancaman pidana denda dalam Artikel 207 ayat (2) itu ialah kategori V, yang cukup berat. Nederland telah menambah pasal baru untuk sumpah palsu ini, yaitu Artikel 207 a, mengenai sumpah palsu pada peradilan internasional, yang merupakan delik aduan. Delik hanya berkaitan dengan akibat hukum atau merugikan terdakwa atau tersangka dalam perkara pidana. Dipidana dibatasi pada

keadaan dalam pemberian keterangan palsu itu merugikan atau dapat merugikan masyarakat.

Keterangan palsu itu dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Dapat dilakukan sendiri atau melalui kuasanya. Oleh karena ancaman pidana penjara tujuh tahun, maka pembuat dapat ditahan. Yang akan dilindungi dengan delik ini ialah kepercayaan publik. Secara tidak langsung akan dilindungi juga wibawa pelaksanaan peradilan. Subyek atau *normadressat*, dibatasi kepada orang yang harus memberi keterangan di bawah sumpah berdasarkan undang-undang. Delik ini adalah delik komisi (*commissiedelict*), harus dilakukan dengan berbuat bukan dengan pengabaian.¹⁶

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 242 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, baik penuntutan umum maupun hakim harus dapat membuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tentang :

- a. Adanya kehendak pada terdakwa untuk memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, baik secara lisan maupun secara tertulis, baik secara pribadi maupun melalui seorang kuasa yang secara khusus telah diberinya kuasa untuk memberikan keterangan tersebut;
- b. Adanya pengetahuan terdakwa bahwa keterangandi bawah sumpah yang diberikan secara lisan atau tertulis ataupun yang diberikan secara pribadi atau melalui seorang kuasa tersebut merupakan suatu keterangan palsu ;

¹⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Jakarta. Universitas Trisakti. 2011. Hlm. 392

- c. Adanya suatu peraturan peundan-undangan yang mensyaratkan keterangan yang ia berikan itu harus dilakukan di bawah sumpah ataupun yang mengaitkan pemberian keterangan tersebut dengan akibat-akibat hukum tertentu.

6. Dampak Kesaksian Palsu

Memberikan keterangan palsu dipandang sebagai kesalahan yang sangat buruk. Hingga saat ini, perbuatan tersebut dianggap merusak kewajiban terhadap kesetiaan umum, berdusta/berbohong, tidak jujur dan mengelabui, bukan hanya kepada hakim, jaksa dan pengacara dalam sidang pengadilan, tetapi telah berdusta terhadap masyarakat/publik, terutama kepada Tuhan.

Supaya dapat dihukum, saksi pemberi keterangan diduga palsu harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar yang bertentangan dengan kenyataan, serta telah memberikan keterangan palsunya di atas sumpah tetapi mendiamkan (menyembunyikan) kebenaran belum tentu berarti sebagai suatu keterangan palsu. Karena, suatu keterangan palsu adalah menyatakan keadaan lain daripada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan disengaja oleh yang bersangkutan/saksi).

Sesuai ketentuan, sumpah dapat diucapkan sebelum atau sesudah memberikan keterangan. Menurut Lembaran Negara (LN) 1920 No 69, sumpah dilakukan menurut agama atau keyakinan/ kepercayaan orang yang bersumpah. Suatu perjanjian juga dapat disamakan dengan sumpah. Sebelum KUHAP berlaku, UU yang memerintahkan keterangan atas sumpah adalah Herziene Indoneisa Reglement (HIR). Pasal 147 dan 265 HIR menentukan, saksi dalam perkara

pidana dan perdata harus terlebih dahulu disumpah menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah pernyataannya di sidang pengadilan. Sehingga, dengan memberikan keterangan palsu (lisan), atau tidak dengan sebenarnya atau tidak sesuai fakta, padahal saksi sendiri sebenarnya mengetahui, melihat dan mengalami hal atau fakta sebenarnya. Namun, dikatakannya tidak tahu, atau lupa, tidak pernah melakukannya, tidak ikut melakukan, tidak mengenal si terdakwa/tersangka atau saksi lain, tidak ikut menerima (misal sejumlah uang), dan seterusnya. Maka, saksi dikenakan sanksi pidana dengan memberikan keterangan palsu.

Sedangkan membuat keterangan palsu (tertulis), yakni berupa surat pernyataan, mengubah (menambah, mengurangi atau merekayasa) surat tersebut sedemikian rupa, sehingga isinya tidak sesuai dengan (fakta) yang sebenarnya.

Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat keterangannya itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari isi surat tersebut (pembohongan), sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa kriteria pemberian keterangan palsu, baik lisan maupun tertulis, yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya (fakta). Setiap perbuatan memberikan keterangan palsu, lisan atau tertulis diancam dengan hukuman pidana (Pasal 242 ayat 1, 2 dan 3 KUHP).

Mengingat, setiap keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memberikan petunjuk kepada hakim bahwa telah terjadi tindak pidana, baik terhadap terdakwa maupun kemungkinan/petunjuk keterlibatan saksi yang ikut

melakukan tindak pidana, karena akan disinkronkan dengan saksi lain dan alat bukti lainnya. Jika keterangan saksi diduga palsu, maka ia dikenakan sanksi pidana (Pasal 242 KUHP jo Pasal 185 KUHP). Saksi yang memberikan kesaksian palsu, menurut KUHP dapat dihukum atau dikenai sanksi pidana di atas tujuh tahun, karena telah melakukan tindak kejahatan.

7. Pengaturan dan Sanksi Tindak Pidana Kesaksian Palsu

Perumusan tindak pidana terhadap keterangan palsu atau kesaksian palsu diatur dalam Pasal 242 KUHP. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut :

- (1) Barang siapa yang dalam hal peraturan undang-undang memerintahkan supaya memberikan keterangan atas sumpah atau mengadakan akibat hukum pada keterangan tersebut, dengan sengaja memberikan keterangan palsu atas sumpah dengan lisan atau dengan surat, oleh dia sendiri atau oleh wakilnya yang di tunjuk untuk itu pada khususnya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.
- (2) Kalau keterangan palsu atau sumpah itu di berikan dalam suatu perkara pidana dengan merugikan terdakwa atau tersangka, maka yang bersalah dihukum dengan penjara selama-lamanya 9 tahun.
- (3) Kesanggupan atau pernyataan yang diperhitungkan oleh undang-undang umum atau yang mengganti sumpah disamakan dengan sumpah.

Yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :¹⁷

¹⁷ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. Hlm. 296-298

a. Unsur Objektif :

Pasal 242 Ayat (1)

- a) Memberikan keterangan palsu atas sumpah secara lisan atau tertulis oleh dia sendiri atau oleh wakilnya yang ditunjuk untuk itu secara khusus.
- b) Dalam hal peraturan perundang-undangan memerintahkan supaya memberikan keterangan atas sumpah atau mengadakan akibat hukum pada keterangan atas sumpah tersebut.

b. Subjektif : Dengan Sengaja

Pasal 242 Ayat (2)

- a) Memberikan keterangan palsu diatas sumpah
- b) Dalam perkara pidana

c. Dengan merugikan terdakwa atau tersangka

Pasal 242 Ayat (3)

Disamakan dengan sumpah kesanggupan atau pernyataan/penguatan yang oleh undang – undang diperintahkan atau menggantikan sumpah.

Perbuatan ini merupakan pemberian keterangan palsu diatas sumpah dalam bentuk *gekwalifisir* atau dalam bentuk dalam pemberatan. Pemberian keterangan palsu diatas ini harus diberikan khusus dalam perkara pidana dan pemberian keterangan itu harus ” dapat menimbulkan kerugian ” bagi terdakwa atau tersangka.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum. Penegak hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegakan hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan perannya semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin mudah menegakkannya.

F. Penerapan dan Proses Penegakan Hukum

Proses penerapan atau penegakan hukum oleh hakim yang dikenal sebagai pelaksanaan putusan hakim/eksekusi merupakan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan, dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan

yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi. Pelaksanaan putusan/eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan.

Putusan Hakim yang wujudnya terdiri dari susunan kata (bahasa) yang sebenarnya mengandung kegiatan berfikir yuridis dari pembuatnya (Hakim). Ia akan mengkonstatir, mensistimatir serta menyimpulkan. Kegiatan ini nampak teraplikasi dalam pemenuhan suatu peraturan hukum yang akan diterapkan pada kumpulan peristiwa yang dikemukakan para pihak, ataupun dalam pola pikir pertimbangan (motivasi), sehingga antara pertimbangan hukum dan keputusannya (amar) mempunyai suatu rangkaian yang logis, tetapi yang tidak kalah pentingnya, secara konseptual putusan harus memberikan keadilan individu dalam setiap kasus (perkara).

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim berwenang menentukan hukum dan keadilan bagi setiap individu yang berperkara. Hakim harus memberikan keadilan kepada setiap pihak dan proses penyelesaiannya tidak memihak. Budaya masyarakat cenderung menolak putusan (perdata) dan pelaksanaan putusan (eksekusi) memerlukan upaya paksa. Bagi warga negara yang telah diputus (perdata) akan melakukan/melaksanakan bunyi putusan secara sukarela dan damai, bilamana hal itu tidak terjadi maka yang bersangkutan berhadapan dengan ancaman pidana.